



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan yang pertama, bahwa DJKI telah mengimplementasikan komponen *Government Public Relations* dalam praktiknya melaksanakan program Jelajah Indikasi Geografis. Komponen-komponen tersebut antara lain *public information services, voluntary public reporting, responsiveness, service management, educational programs, compliance with laws, public participation in government, support for the government, dan transparency*. Tetapi, dari kesembilan komponen *Government Public Relations*, DJKI belum mengimplementasikan keseluruhannya secara baik.

Kedua, penelitian ini mengidentifikasi dua aspek yang menjadi kendala dan kekurangan utama, yaitu *public informations services, voluntary public reporting, dan aspek responsiveness* yang masih kurang diterapkan oleh DJKI. Dalam aspek *public informations services*, DJKI masih memiliki ruang untuk memperbaiki strategi komunikasi dan hubungan dengan media. Penelitian ini menemukan bahwa DJKI belum sepenuhnya efektif dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media. Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan keterlibatan dengan media, baik melalui konferensi pers, siaran pers, atau kerja sama dalam penyusunan berita terkait program Jelajah Indikasi Geografis. DJKI perlu memperkuat kerja sama dengan media untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, terpercaya, dan mendaatkan cakupan yang luas. Dengan demikian, publik dapat lebih memahami dan mengapresiasi upaya DJKI dalam melindungi dan mempromosikan IG. Selain itu, dalam hal *voluntary public reporting*, kurangnya keterlibatan dari komunitas-komunitas pemilik hak IG dalam mendukung penyebaran informasi dan pengetahuan kepada masyarakat, baik mengenai pentingnya IG maupun produk-produk tersertifikasi IG. DJKI perlu mendorong partisipasi komunitas-komunitas pemilik hak IG dalam mengedukasi masyarakat

tentang keberadaan dan pentingnya IG. Dengan hal itu, komunitas-komunitas tersebut dapat berperan untuk mempromosikan dan memperkenalkan IG kepada masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya, aspek *responsiveness* juga menjadi tantangan yang perlu ditangani oleh DJKI. Responsiveness mencakup kemampuan untuk merespon keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa DJKI masih kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat pada program Jelajah Indikasi Geografis. DJKI perlu mengembangkan mekanisme yang lebih terstruktur dan responsif dalam menerima dan menanggapi keluhan dan saran masyarakat. Melalui pendekatan ini, DJKI dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan publik, menciptakan kepercayaan, dan memperoleh wawasan berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas program dan kebijakan mereka. Adapun, kekurangan yang ditemukan adalah bahwa DJKI tidak melakukan evaluasi terhadap program Jelajah Indikasi Geografis ini.

Secara keseluruhan, meskipun DJKI telah mengimplementasikan komponen *Government Public Relations* dalam praktiknya melalui program Jelajah Indikasi Geografis, masih terdapat kekurangan yang perlu diatasi. Perbaikan yang diperlukan terutama terkait aspek *public informations services* dalam hal *media relations* dan aspek *responsiveness* dalam menghadapi keluhan, saran, dan permintaan masyarakat.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan komponen-komponen *Government Public Relations* dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif untuk mengetahui seberapa pengaruh dari implementasi *Government Public Relations* dalam program Jelajah Indikasi Geografis Indonesia, juga untuk mengetahui seberapa efektif program ini yang diukur dengan angka yang jelas.

5.2.2 Saran Praktis

Beberapa saran untuk DJKI adalah sebagai berikut. Pertama, dalam hal *Public Information Services*, DJKI perlu meningkatkan strategi publisitas dengan mengoptimalkan hubungan dengan media. Menyediakan informasi yang menarik dan relevan dapat meningkatkan cakupan pemberitaan terkait IG. Kedua, dalam hal *Voluntary Public Reporting*, DJKI perlu membangun kerjasama yang lebih erat dengan para komunitas pemilik hak IG. Dengan bekerjasama secara aktif, komunitas-komunitas pemilik hak IG dapat membantu DJKI untuk mengedukasi masyarakat tentang keberadaan dan pentingnya IG. Ketiga, dalam hal *Responsiveness*, DJKI perlu meningkatkan responsivitas terhadap komunikasi masyarakat dengan memberikan fasilitas konsultasi yang memadai dan arahan dalam penyusunan dokumen deskripsi untuk pendaftaran IG. Keempat, DJKI perlu melakukan evaluasi yang akurat terhadap program yang dijalankan, misalnya dengan mengumpulkan data tentang penjualann produk, jumlah pengunjung, dan faktor lain yang relevan. Evaluasi ini penting untuk meningkatkan kualitas program DJKI ke depannya.

5.2.3 Saran Sosial

Kesadaran masyarakat tentang IG perlu ditingkatkan untuk membantu mempertahankan identitas budaya suatu daerah, melestarikan tradisi dan pengetahuan lokal serta mendukung mata pencaharian masyarakat setempat. Selain itu, IG mendorong kerja sama dan kebanggaan komunitas, mengarah pada solidaritas sosial dan pengembangan ekonomi lokal. Produk dengan sertifikasi IG juga sering menjadi alat diplomasi budaya yang memperkuat hubungan antar daerah ataupun negara dengan mempromosikan keunikan dan keaslian produk lokal, IG menciptakan kebanggaan dan kesadaran akan kekayaan budaya, serta memberikan kontribusi positif pada pembangunan sosial dan pemberdayaan komunitas.